

# **Analisis Framing dalam Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024 di Tribun-Timur.com**

## *Framing Analysis in Coverage Postponement of the 2024 Election at Tribun-Timur.com*

**Muh. Shahrul Nizam<sup>3</sup>, Diana Rina<sup>2</sup>, Indah Pratiwi Manggaga<sup>3</sup>**

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: dianarina@unismuh.ac.id

### **Abstract**

*The postponement of the 2024 election has been widely highlighted by the media, especially online media. Tribun-Timur.com is one of the online media that has published a lot of news related to the postponement of the 2024 election. Tribun-Timur.com has been actively reporting on the postponement of the 2024 election since the election was taking place until the simultaneous election in Indonesia. In its reporting, Tribun-Timur.com describes many things about the postponement of the 2024 election, including the postponement of the 20224 election carried out by Bahlil and Luhut Binsar Panjaitan with their statements and the responses of several political experts. This study aims to determine how Tribun-Timur.com frames the news of the postponement of the 2024 election using Robert N Entman's Framing model analysis. The results of the study show that Tribun-Timur.com is more informative and tries to lead public opinion by displaying differences in the results of responses to the postponement of the 2024 election. Several different responses to the statements of Bahlil and Luhut Binsar Panjaitan who want to postpone the 2024 election and get rejection from the political expert community.*

**Keywords:** framing analysis, election postponement

### **Abstrak**

Penundaan pemilu 2024 banyak disoroti media, terutama media online. Tribun-Timur.com merupakan salah satu media online yang banyak memuat berita terkait penundaan pemilu 2024. Pemberitaan penundaan pemilu 2024 gencar dilakukan Tribun-Timur.com pada saat mendekati Pemilu berlangsung hingga pemilihan serentak di Indonesia. Dalam pemberitaannya, Tribun-Timur.com menggambarkan banyak hal tentang penundaan pemilu 2024, di antaranya penundaan pemilu 20224 yang dilakukan Bahlil dan Luhut Binsar Panjaitan dengan statementnya dan tanggapan beberapa pakar politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tribun-Timur.com membingkai pemberitaan penundaan pemilu 2024 dengan menggunakan analisis Framing model Robert N Entman. Hasil penelitian menunjukkan Tribun-Timur.com lebih informatif dan mencoba menggiring opini publik dengan menampilkan perbedaan hasil tanggapan penundaan pemilu 2024. Beberapa tanggapan yang berbeda bagaimana statement Bahlil dan Luhut Binsar Panjaitan yang ingin melakukan penundaan pemilu 2024 dan mendapatkan penolakan dari masyarakat pakar politik.

**Kata Kunci:** analisis framing, penundaan pemilu

## **PENDAHULUAN**

Media online menjadi sumber informasi yang paling fleksibel di kalangan masyarakat. Media online merupakan jurnalistik online yang diartikan sebagai “Pelaporan fakta atau kejadian yang dibuat dan disebarluaskan melalui internet” (Romli, 2018). Sedangkan dalam perspektif komunikasi massa, media online dikatakan sebagai bahan atau objek analisis teori “media baru” yaitu istilah yang berpatokan pada permohonan akses ke

isi/konten informasi kapan saja, di mana saja pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten juga aspek generasi “real-time” Hadirnya media baru ini memudahkan masyarakat untuk mendapat dan mengakses informasi yang terjadi setiap harinya kapan pun dan di mana pun masyarakat berada selama masyarakat terhubung dengan jaringan internet.

Media baru ini tidak hanya dikenal mudah diakses, namun media ini juga dikenal sebagai media yang memiliki kecepatan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi yang disebarkan atau dipublikasikan setiap harinya juga beragam, mulai dari kejadian bencana alam di suatu daerah, bentrok, kejadian tentang penemuan teknologi baru, hingga penyebaran informasi tentang pendidikan, politik, dan ekonomi. Salah satu isu politik adalah penundaan pemilu 2024 dan menjadi masalah social politik. Salah satu isu politik yang paling disoroti dan dipublikasikan secara serempak dari berbagai media cetak, elektronik dan online tahun 2022 adalah penundaan pemilu 2024. Adapun media yang memublikasikan pemberitaan tentang penundaan pemilu 2024. Di antaranya Tribun-Timur.com.

Wacana penundaan pemilu pertama kali terdengar publik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Bahlil Lahaladia pada bulan Januari 2022 ini digaungkan setelah adanya dukungan dari beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar. Pimpinan dari partai-partai tersebut menyetujui adanya wacana penundaan pemilu 2024 serta adanya persetujuan dari beberapa pengusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Alasannya, untuk memulihkan stabilitas sosial politik dan perekonomian yang terdampak dari pandemic Covid-19 ini masih memerlukan waktu. Wacana penundaan pemilu semakin kuat setelah adanya big data yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebutkan bahwa ada 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 untuk ditunda. Alasannya agar menjaga kondisi sosial politik dan ekonomi negara. Pakar Hukum Tata Negara RI, Zainal Arifin Mochtar mengatakan skenario penundaan pemilu ini bisa berakibat pemilihan presiden tidak lagi dipilih melalui sistem pemilu namun dipilih langsung oleh MPR.

Tribun-timur.com salah satu media online yang memublikasikan lebih dari sepuluh berita tentang penundaan pemilu 2024. Pemberitaan tersebut dimulai dari adanya wacana atau informasi dari

pemberitaan media massa atau media online tentang penundaan pemilu 2024. Penyebaran suatu informasi ke publik, media memiliki tanggung jawab dan kebebasan. Tanggung jawab yang dimaksudkan ialah media dan jurnalis yang menulis berita harus memublikasikan sebuah informasi yang benar terjadi di masyarakat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Sedangkan kebebasan yang dimaksudkan ialah jurnalis atau wartawan memiliki kebebasan dalam melakukan peliputan dan penyebaran sebuah informasi ke khalayak selama informasi itu berpengaruh positif atau penting bagi publik (Nurudin, 2014).

Sebelum sebuah informasi dipublikasikan ke khalayak luas, informasi atau data yang dimiliki wartawan melalui banyak proses lebih dulu. Proses tersebut dimulai pada rapat redaksi, dalam rapat redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi, diikuti oleh jurnalis, editor, fotografer dan semua pihak yang bertanggung jawab dalam keredaksian, dalam rapat itu membahas tentang isu yang hangat diperbincangkan masyarakat, penentuan isu yang akan diliput oleh jurnalis, penentuan angle berita, dsb. Setelah rapat redaksi wartawan melakukan peliputan di lapangan/ tempat terjadinya fenomena (pengumpulan data), pengolahan data, kemudian data yang sudah diolah jurnalis dikumpul pada redaktur (editor) kemudian dilihat oleh pimpinan redaksi (pempred), dalam hal ini pempred yang menentukan berita tersebut layak atau tidak layak dipublikasikan.

Ada beberapa indikator sehingga suatu berita dapat dipublikasikan di media (cetak, elektronik dan online). Pertama, proses kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan telah sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kedua, data yang telah diolah oleh jurnalis memiliki nilai berita atau layak berita sehingga dapat dipublikasikan ke khalayak. Isi dalam buku *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Kusumaningrat dan Purnama, 2017) disebutkan beberapa nilai berita di antaranya, memiliki nilai aktualitas, kedekatan, dampak, human interest, minat pribadi, konflik, simpati, kemajuan, seks, usia, binatang dan humor.

Menurut Ashadi Siregar (Chaer Abdul, 2010), suatu peristiwa atau kejadian, secara

umum yang layak diangkat menjadi berita adalah yang mengandung suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai kemungkinan akan memengaruhi kehidupan orang banyak. Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi orang banyak. Kejadian atau peristiwa yang menyangkut hal-hal baru terjadi, atau baru ditemukan. Kejadian atau peristiwa yang dekat dengan pembaca. Kejadian atau peristiwa mengenai hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca. Kejadian atau peristiwa yang memberi sentuhan perasaan, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.

Dua indikator di atas secara umum digunakan media, namun ada indikator lain dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah informasi dipublikasikan pada khalayak yang digunakan media, yaitu karena kepemilikan media atau pemilik modal besar dalam media. Pemilik media bisa menentukan berita apa yang seharusnya dipublikasikan media yang dinaunginya, entah itu berpengaruh positif atau tidak bagi khalayak. Pemilik media bisa melakukan apa saja sesuai kepentingannya. Di Indonesia banyak kasus seperti ini terjadi. Tidak hanya sebagai pemilik modal besar dalam sebuah media, tapi pemilik modal ini juga adalah elit politik. Beberapa media yang pernah mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan public. seperti *MediaIndonesia.com* dan *Vivanews.com* sangat update dalam menyampaikan setiap gejolak politik yang terjadi. Media-media tersebut saling menyerang, saling menyudutkan dan saling menjatuhkan demi kepentingan pemilik media. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur mediamedia tersebut karena pemberitaannya yang tidak objektif dan cenderung tendensius. Jika ditinjau dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 dalam Bab II tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, praktik seperti ini telah bergeser dari ketentuan yang tertera pada pasal 2, pasal 3 ayat 1, dan pasal 6.

Berangkat dari beberapa indikator di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian di media online *Tribun-Timur.com* dengan berfokus pada pemberitaan penundaan pemilu 2024 edisi tahun 2022. Peneliti memilih media

online *Tribun.Timur.com* sebagai tempat meneliti karena *Tribun.Timur.com* salah satu media online yang memublikasikan secara berturut-turut pemberitaan penundaan pemilu 2024. Selain itu, peneliti memilih *Tribun.Timur.com* karena media regional tersebut salah satu media yang besar di Kota Makassar dan memiliki jaringan media yang luas di berbagai Provinsi Indonesia, seperti Jogja, dan Sulawesi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman dengan jangka waktu penelitian terhadap berita penundaan pemilu yang tayang di *Tribun-Timur.com* selama Maret- April pada tahun 2022 dengan delapan edisi. Melalui analisis framing metode Entman, peneliti dapat mengetahui seperti apa pembingkaihan berita Makassar *Tribun.Timur.com*. Melalui pembingkaihan berita, peneliti dapat mengetahui apa yang ditonjolkan dan apa yang tidak ditonjolkan (disembunyikan) *Tribun-Timur.com*. dalam pemberitaannya. Melalui ini juga dapat diketahui apakah *Tribun-Timur.com*. melakukan perannya dengan baik atau tidak sebagai media. Jenis dan tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang memiliki tujuan menggambar, meringkas berbagai kondisi, situasi atau realitas yang terdapat dalam berita penundaan pemilu 2024 sebagai objek penelitian. Untuk sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah teks-teks berita penundaan pemilu 2024 pada media online *Tribun-timur.com* yang tayang pada tahun 2022. Sumber data sekunder ialah sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini seperti buku referensi, jurnal penelitian, esai-esai dan artikel yang relevan dengan unit observasi dan unit analisis dari penelitian yang dilakukan. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hamrun, S.IP, M.Si, Pakar Politik dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Peneliti menilai Hamrun mampu memberikan informasi dan menganalisis tentang situasi dan kondisi dalam permasalahan wacana penundaan pemilu 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembingkajian berita penundaan pemilu 2024 pada Tribun-Timur.com sebagai berikut :

1. Berita 1 (Selasa, 1 Maret 2022)

<b>Judul</b> Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Jusuf Kalla: Konstitusi Mengatakan Lima Tahun, Ya Lima Tahun	
<b>Unit Frame</b>	<b>Deskripsi Teks Berita</b>
<b>Define problems</b>	Wakil presiden RI Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla menanggapi usul penundaan pemilu 2024. Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi. Sebelum ketua umum partai (PKB) Muhamin Iskandar mengklain penundaan pemilu 2024. Klaim atas analisi big data dari 100 juta akun media sosial, 60 persen mendukung dan 40 menolak penundaan pemilu. Dampak pandemi covid-19, Partai Nasdem menolak penundaan pemilu. Surya Paloh menolak usulan penundaan pemilu 2024.
<b>Diagnose Cause</b>	Wakil presiden RI Jusuf Kalla menanggapi usul penundaan pemilu 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamin Iskandar mengklaim penundaan pemilu 2024.
<b>Make moral judgement</b>	Jusuf Kalla menolak penundaan pemilu 2024. Muhaimin Iskandar mengklaim penundaan pemilu 2024. Surya Paloh menolak penundaan pemilu.
<b>Treatmen</b>	Publikasi penundaan pemilu berharap pemilu 2024 tidak tertunda dan tidak ada lagi pembahasan penundaan pemilu dan taat pada konstitusi.
<b>Recommendation</b>	

2. Berita 2 (Kamis, 10 Maret 2022)

## **Judul** Kontroversi Penundaan Pemilu 2024

<b>Unit frame</b>	<b>Deskripsi Teks Berita</b>
<b>Define problems</b>	Munculnya gagasan penundaan pemilu oleh Bahlil Lahadalia. Gagasan itu bertentangan dengan konstitusi yang ada. Beberapa partai yang mendukung penundaan pemilu. Dan penolakan penundaan pemilu juga terjadi di kalangan masyarakat sipil.
<b>Diagnose causes</b>	Gagasan Bahlil mengenai penundaan pemilu di hidupkan kembali oleh Muhaimin Iskandar. Reaksi penundaan pemilu datang dari partai yaitu: PDIP, Partai demokrat, PKS, PPP, Nasdem, Gerindra. Penolakan penundaan pemilu datang dari masyarakat sipil seperti pakar hukum, Prof.Dr.Jimly Assidik, SH, Dr, Hamdan Zoelva, SH dan Prof. Dr.Yusril Ihsa Mahaendra, SH.
<b>Make moral judgement</b>	Pemberitaan kontroversi terkait penundaan pemilu. Beberapa partai yang mendukung penundaan pemilu. Dan penolakan penundaan pemilu juga terjadi di kalangan masyarakat sipil.
<b>Treatment recommendation</b>	Kontroversi tiba-tiba surut dari hasil rilis 1.197 responden dari 34 provinsi yang diacak menyimpulkan mayoritas responden tidak setuju penundaan pemilu.

3. Berita 3 (Sabtu, 26 Maret 2022)

<b>Judul</b> PDIP Sulsel Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024	
<b>Unit frame</b>	<b>Deskripsi Teks Berita</b>
Define problems	<b>Partai yang meminta penundaan pemilu 2024. Tolak penundaan pemilu menolak PDIP Sulsel perubahan UUD 1945. Konstitusi yang menetapkan pemilu 5 tahun sekali.</b>
Diagnose Cause	<b>PDIP dengan tegas menolak isu penundaan pemilu. Hal itu disampaikan sekretaris PDIP suslsel Rudy Pieter Goni.</b>
Make moral judgement	<b>Sekretaris PDIP Rudy Pieter Goni mengakui adanya penolakan penundaan pemilu. Konstitusi yang menetapkan pemilu 5 tahun sekali.</b>
Treatment recommendation	<b>Rudy Pieter Goni berkata kami tidak ingih gaduh. Maka harus taat konstitusi.</b>

## 4. Berita 4 (Kamis, 7 April 2022)

<b>Judul</b> Penundaan Pemilu 2024, Disuarakan Luhut hingga Tito Karnavian, Jokowi “Jangan Timbulkan Polemik”	
<b>Unit frame</b>	<b>Deskripsi Teks Berita</b>
<i>Define problems</i>	Joko widodo menyinggung jajaran menterinya yang menyuarakan penundaan pemilu 2024. Jokowi meminta penundaan pemilu tidak lagi dibahas agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat
<i>Diagnose Cause</i>	Joko Widodo menyinggung menterinya yang menyuarakan penundaan pemilu 2024
<i>Make moral judgment</i>	Menggambarkan pemberitaan di mana beberapa menteri dari Joko Widodo yang menyuarakan penundaan pemilu. Jokowi juga mengatakan untuk tidak mengatakan penundaan pemilu agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat.
<i>Treatment recommendation</i>	Melihat perkataan Joko Widodo agar tidak berkata adanya penundaan pemilu agar tidak terjadi polemik.

## 5. Berita 5 (Jumat, 8 April 2022)

Tabel 4.6

<b>Judul</b> Demo Tolak Penundaan Pemilu 2024, Mahasiswa Unismuh Makassar Saling Dorong dengan Polisi	
<b>Unit frame</b>	<b>Deskripsi Teks Berita</b>
<b>Define problems</b>	Menolak penundaan pemilu 2024, menolak wacana 3 periode presiden, evaluasi kinerja menteri perdagangan, copot ketua DPR RI Puan Maharani, menolak kenaikan BBM, menuntaskan polemik BBM, mendesak DPR untum merevisi UU pemindahan IKN, menolak kenaikan PPN 11 persen, reshufel Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kembalikan marwah demokrasi dan revisi UUD Omnibuslaw.
<b>Diagnose cause</b>	Unjuk rasa penolakan penundaan pemilu yang dilakukan mahasiswa Unismuh. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan Kapolsek Rappocini Kompol Amrin Ambo Tang.
<b>Make moral judgement</b>	Aksi tuntutan mahasiswa dalam penolakan penundaan pemilu dan beberapa masalah seperti menolak wacana tiga periode presiden, evaluasi kinerja Menteri Perdagangan, copot ketua DPR RI Puan Maharani, menolak kenaikan BBM, menuntaskan polemik BBM, mendesak DPR untuk merevisi UU pemindahan IKN, menolak kenaikan PPN 11 persen, reshuffle Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kembalikan marwah demokrasi dan revisi UUD Omnibuslaw. Yang menjadi masalah dalam masyarakat.
<b>Treatment recommendation</b>	Bagaimana tuntutan mahasiswa dapat dipenuhi untuk mengembalikan marwah demokrasi.

## 6. Berita 6 (Selasa, 12 April 2022)

<b>Judul</b> Nurdin Halid: Golkar ANAK Kandung Reformasi, Tidak Setuju Penundaan Pemilu 2024	
---	--

<b>Unit frame</b>	Deskripsi Teks Berita
<b>Definie problems</b>	Bagaimana Ketua Golkar Nurdin Halid dalam posisinya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Mahasiswa lintas perguruan tinggi di berbagai kota di tanah air menolak penundaan pemilu dan 3 perodesasi presiden.
<b>Diagnoses causes</b>	Penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digambarkan Tribun-Timur.com oleh Nurdin Halid selaku wakil ketua umum DPP Partai Golkar serta mahasiswa menentang penundaan pemilu.
<b>Make moral judgement</b>	Tentang penolakan penundaan pemilu oleh sejumlah pihak seperti Wakil Ketua Umum Golkar dan mahasiswa.
<b>Treatment recommedation</b>	Menurut partai Beringin dengan tegas menolak pemilu dan pemilu dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

7. Berita 7 (Rabu, 13 April 2022)

<b>Judul</b> Alasan Luhut Tak Mau Buka “Big Data” Penundaan Pimilu? BEM UI Curiga Demi Kepentingan Sosok ini	
<b>Unit frame</b>	Deskripsi Teks Berita
<b>Define problems</b>	Luhut Binsar Pandjaitan menemui mahasiswa demo. Perlawanan Luhut terhadap mahasiswa terkait big data. Kegelisahan yang timbul di masyaraat terkait big data yang tidak mau di buka Luhut. Penolakan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden.
<b>Diaognose causes</b>	Luhut Binsar Pandjaitan menemui para mahasiswa UI yang protes penolakan penundaan pemilu dan masa jabatan presiden. Melki, selaku BEM UI meminta big data yang menjadi kecurigaan merupakan kepentingan pribadi presien Jokowi.
<b>Make moral judgement</b>	Keyakinan Luhut menemui mahasiswa UI dalam aksi penolakan penundaan pemilu dan perpajakan jabatan presiden serta big data yang

	diminta BEM UI untuk diperlihatkan dari hasil survei penundaan pemilu yang ditutupi Luhut.
<b>Treatment recommendation</b>	Pembingkaiian berita ini melihat statemen Luhut mengenai persoalan bid data adalah bahwa dia punya hakim untuk tidak membukanya.

8. Berita 8 (Kamis, 14 April 2022)

Tabel 4.9

<b>Judul</b> Politisi PDIP yang Diklaim Luhut Panjaitan Bukan Orang, Tapi Biota Laut	
<b>Unit frame</b>	<b>Deskripsi Teks Berita</b>
<b>Define problems</b>	Kritika terkait big data yang diklaim oleh Luhut Binsar Panjaitan mengenai penundaan pemilu 2024. Big data yang seolah-olah dijadikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Penundaan pemilu di lontarkan dari seorang Menko Maritim dan Investasi.
<b>Diagnose causes</b>	Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan kritikan pedas dari politisi PDIP Mansinton Pasaribu terkait big data.
<b>Make moral judgement</b>	Tribun dari kompas Tv memberikan gambaran terkait kritikan pedas Luhut Binsar Panjaitan terkait big data yang diklaim Luhut tentang penundaan pemilu. Kritikan tersebut datang dari partai politik PDIP Masinton Pasaribu
<b>Treatment recommedation</b>	Melihat statemen Masinton Pasaribu persoalan pengklaiman yang dilakukan Luhut tentang big data yang dimaksud adalah biota laut.

Adapun Pembingkaiian (framing) berita penundaan pemilu 2024 pada Tribun-Timur.com sebagai berikut :

Berita 1

Define problems

Terdapat tiga aspek yang digambarkan dalam berita ini, dan ke tiga ditonjolkan yaitu, penolakan penundaan pemilu oleh Jusuf Kalla,

klaim Muhaimin Iskandar penundaan pemilu, Partai Nasdem tolak penundaan pemilu 2024.

Tribun-Timur.com mendefinisikan soal wacana penundaan pemilu oleh Jusuf Kalla, ada dua sudut pandang tentang penundaan pemilu 2024 yakni Jusuf Kalla dan Partai Nasdem tolak penundaan pemilu karena melanggar konstitusi dan Muhaimin Iskandar usul penundaan pemilu. Hasil dari pembahasan masalah ini adalah pemilihan 2024 tetap adanya ketentuan pandangan mengenai penundaan pemilu. Jusuf Kalla, Pendiri Partai Nasdem Surya Paloh dan Iskandar Muhaimin memiliki pandangan yang berbeda.

Make Moral Judgement

Tribun-Timur.com menggambarkan Wakil presiden RI Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla menanggapi usulan penundaan pemilu 2024 dan partai nasdem Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi. Sebelum ketua umum partai (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim penundaan pemilu 2024.

Treatment recommendation

Dari tiga aspek yang digambarkan Tribun-Timur.com dalam pemberitaan ini, yang dijadikan penyelesaian Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Jusuf Kalla: Konstitusi Mengatakan Lima Tahun, Ya Lima Tahun dengan melihat hasil ucapan Surya Paloh "saya hormat jika parpol lainnya argumentasi untuk usul perpanjangan masa kepemimpinan".

Berita 2

Define problems

Ada dua aspek yang menonjol yang digambarkan dari hasil publikasi kontroversi penundaan pemilu yaitu: elemen atau partai yang setuju dengan penundaan pemilu dan masyarakat sipil yang tolak penundaan pemilu 2024. Tribun-Timur.com mendefinisikan hasil survei yang dilakukan ketua lembaga hasil survei melalui responden secara acak di 34 provinsi menolak penundaan pemilu 2024, jadi hasilnya pemilu 2024 tetap lanjut.

Diagnose Cause

Adanya perbedaan pendapat yang dilakukan dalam penundaan pemilu 2024 yang di mana partai politik seperti PDIP, Partai Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, Gerindra yang mendukung penundaan pemilu dan penolakan muncul dari masyarakat sipil yang tergabung oleh pakar

hukum adanya perbandingan pendapat dan hasil survei digambarkan pada akhir pemberitaan.

Make moral judgment

Tribun-Timur.com menggambarkan adanya kontroversi dalam penundaan pemilu 2024. Beberapa partai yang mendukung penundaan pemilu dan juga terjadi di kalangan masyarakat sipil.

Treatment recommendation

Dari dua aspek tersebut persoalan penundaan pemilu dan penolakan penundaan 2024 dilihat bagaimana hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indonesia dan akhir pemilihan yang dilakukan tahun 2024.

Berita 3

Define problems

Pada wawancara yang dilakukan Rudy di YouTube Tribun-Timur ketika menjadi narasumber seputar ngobrol politik. Satu aspek yang menjadi gambaran yang dia sampaikan persoalan tolak penundaan pemilu. Yang menjadi aspek taat kepada konstitusi dan partai yang menolak penundaan pemilu sebagai hasil yang ditonjolkan.

Diagnose cause

Diagnose cause dalam berita ini, menjelaskan tentang hasil wawancara oleh sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni tentang penolakan terhadap penundaan pemilu 2024 yang terjadi. Dimana partainya juga menolak penundaan pemilu yang menjadi cacat konstitusi dan menjadi perubahan UUD 1945. Karena konstitusi harga mati.

Make moral judgement

Make moral judgement pada berita ini yaitu persoalan statemen sekretaris DPD PDIP Rudy tentang partainya yang dimana penolakan penundaan pemilu dia sampaikan juga ketua partai PDIP menolak keras penundaan pemilu yang cacat konstitusi karena konstitusi harga mati dan dapat mengubah UUD 1945. Yang dimana pemilihan 5 tahun sekali.

Treatment recommendation

Tribun-Timur.com menggambarkan dalam gambaran sekretaris DPD PDIP bahwa pemilu harus tetap terlaksana di 2024 nantinya.

Berita 4

Define problems

Masalah yang diangkat dalam berita ini adalah Joko Widodo menyinggung jajaran menteri yang menyerukan penundaan pemilu 2024. Pernyataan Joko Widodo juga menonjolkan para menteri yang meminta penundaan pemilu dan penundaan pemilu tidak dibahas lagi.

Diagnose causes

Diagnose causes dalam berita ini digambarkan Joko Widodo tidak lagi menyinggung penundaan pemilu 2024 yang menjadi masalah sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat.

Make moral judgement

Tribun-timur menggambarkan statemen Joko Widodo dalam menanggapi penundaan pemilu yang terjadi dan ada beberapa kabinetnya yang menyerukan penundaan pemilu yang mengakibatkan permasalahan. Tribun juga menanggapi beberapa statmen Jokowi untuk tidak lagi membahas penundaan pemilu 2024.

Treatment Recommendation

Treatment Recommendation dalam berita ini bagaimana hasil pemilihan umum yang tetap berjalan yang diharapkan Jokowi dan masyarakat.

Berita 5

Define problems

Terdapat 10 poin yang digambarkan dalam berita ini, hanya 1 poin yang paling ditonjolkan yaitu penundaan pemilu 2024 yang menjadi wacana atau polemik untuk mencederai marwah demokrasi.

Tribun-Timur.com mendefinisikan bagaimana masalah penundaan pemilu yang terjadi sehingga mahasiswa menggugat penundaan pemilu dan hasilnya pemilu harus tetap jalan sebagaimana mestinya.

Diagnoses causes

Tribun-timur.com menjelaskan bahwa penundaan pemilu dan beberapa poin lainnya oleh mahasiswa.

Make moral judgement

Make moral judgement bagaimana tuntutan mahasiswa persoalan menolak penundaan pemilu 2024, menolak wacana 3 periode presiden, evaluasi kinerja menteri perdagangan, copot ketua DPR RI Puan Maharani, menolak kenaikan BBM,

menuntaskan polemik BBM, mendesak DPR untuk merevisi UU pemindahan IKN, menolak kenaikan PPN 11 persen, reshuffle Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kembalikan marwah demokrasi dan revisi UUD Omnibuslaw.

Treatment recommendation

Treatment recommendation adalah bagaimana aspirasi yang dilakukan mahasiswa dapat dipenuhi atau dipertimbangkan kembali.

Berita 6

Define problems

Ada dua aspek yang dapat dilihat dari gambaran berita ini dan dua aspek itu ditonjolkan secara bersamaan yang dimana wakil ketua umum Partai Golkar Nurdin Halid dan mahasiswa yang bersama menolak penundaan pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode.

Diagnose causes

Kedua isi berita yang digambarkan secara serentak menolak penundaan pemilu dan 3 periode presiden.

Make moral judgement

Make moral judgement dalam berita ini bagaimana penolakan penundaan pemilu dan juga mahasiswa yang menolak penundaan pemilu serta perpanjangan jabatan presiden

Treatment recommendation

Treatment recommendation dalam berita ini kedua statemen penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, dan pemilu dapat terlaksana di tahun 2024.

Berita 7

Define problems

Melihat beberapa aspek yang digambarkan berita ini adalah dengan melihat yang paling ditonjolkan tentang penundaan pemilu dan big data yang menjadi masalah.

Tribun-timur.com mendefinisikan dua persoalan yang menjadi permasalahan dengan dua perspektif yang berbeda juga yang di mana penolakan penundaan pemilu dan big data. Penundaan pemilu merupakan hasil klaim statmen Muhaimin Iskandar dan big data merupakan hasil survei yang dilakukan Luhut.

Diagnose causes

Melihat hasil gambaran berita ini yang dimana permasalahan yang terjadi terkait penundaan

pemilu oleh Luhut dan mahasiswa yang meminta untuk membuka big data yang menjadi keresahan masyarakat dan menjadi kecurigaan sebagai kepentingan presiden.

Make moral judgement

Make moral judgement dalam berita ini benar adanya dimana Luhut Binsar Pandjaitan menemui mahasiswa UI terkait penundaan pemilu 2024, dan big data yang diminta mahasiswa untuk dibuka.

Treatmen recommendations

Treatmen recommendations bagaimana Luhut Binsar Pandjaitan menemui mahasiswa untuk menjelaskan penundaan pemilu dan tidak disetujui presiden.

Berita 8

Define problems

Define problems yang disampaikan berita ini ada 1 yaitu big data penundaan pemilu yang diklaim oleh Luhut sehingga menjadi kritikan pedas baginya yang disampaikan oleh Mansinton Pasaribu.

Diagnose causes

Diagnose causes yang ditonjolkan Tribun-Timur.com dalam berita ini, big data yang menjadi pembahasan oleh Mansinton Pasaribu.

Make moral judgement

Make moral judgement yang tergambar dalam berita ini dengan melihat kritikan pedas Mansinto terhadap Luhut mengenai pengklaiman big data penundaan pemilu.

Treatmen recommendation

Treatmen recommendation dengan melihat statemen yang disampaikan Mansinton mendorong agar Luhut membuka big data yang mendukung penundaan pemilu, sebab, saat ini adalah eranya transparansi.

Hasil penelitian atau temuan harus jelas dan fokus. Interpretasi mengeksplorasi signifikansi dari hasil/temuan penelitian, bukan merupakan reduplikasi atau sekedar membaca kembali isi tabel.

## KESIMPULAN

Tribun-Timur.com lebih informatif dengan menampilkan berbagai aspek dalam pemberitaan penundaan pemilu 2024. Berdasarkan Teori Entman dengan empat indikator seperti define problems, dua berita

yang pro dan kontra mengenai penundaan pemilu 2024. Diagnose cause yaitu statement Luhut Binsar Pandjaitan tentang penundaan pemilu yang kontroversi. Make moral judgement, mengenai bagaimana penundaan pemilu yang menjadi masalah ditemukan dalam dua berita ini. Statement judgement berharap pemilu 2024 tidak ditunda dan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya setiap 5 tahun sekali.

Selain informatif, Tribun-Timur.com juga menampilkan pemberitaan yang dapat menggiring opini pembaca dengan menonjolkan perbedaan hasil pandangan terkait argumentasi penundaan pemilu. Oleh karena itu, saran peneliti dalam tulisan ini adalah sebagai media, Tribun.timur.com sebaiknya menampilkan suatu berita yang lebih mendidik agar dapat meningkatkan pengetahuan khalayak atau masyarakat, karena pada saat ini media menjadi salah satu sumber informasi dan sumber pengetahuan yang paling besar, berpengaruh dan terpercaya bagi masyarakat. Saran lainnya, Tribun-Timur.com sebaiknya menampilkan informasi yang tidak menggiring opini masyarakat dan memberitakan suatu peristiwa berdasarkan realitas dan kebutuhan publik, bukan hanya karena kepentingan sepihak dari media itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, H. (2019). *kontraksi politik dalam ruang media prespektif critical discourse analysis*. Jakarta: prenamedia group.
- Chaer, A. (2010). *bahasa jurnalistik*. Jakarta: PT rineka cipta.
- Eriyanto. (2012). *analisis framing kontruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: PT Lkis printing cemerlang.
- Fajar, M. N. (2010). *mahir menulis berita*. Jakarta: PT multi kreasi satu delapan.
- fikri AR, M. (2015). *konflik agama dan kontruksi new media*. malang: universitas briwijaya press.
- kusumaningrat, hikmat, P. (2017). *jurnalistik teori dan praktik*. bandung: PT remaja rosda karya.
- Nurudin. (2014). *PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Romli, A. S. M. (2018). *JURNALISTIK ONLINE: PANDUAN MENGELOLA MEDIA ONLINE*. bandung: NUANSA CENDIKIA.

- ROMLI, K. (2016). *KOMUNIKASI MASSA*. Jakarta: PT Grasindo.
- Severin, W. J., & Tankard Jr, J. W. (2014). *TEORI KOMUNIKASI: Sejarah, METODE, Dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: PT pranada media group.
- Sumadira, A. S. H. (2011). *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: panduan praktis jurnalis profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Tryas, R., Iqbal, F., & Budyatmojo, W. (2024). Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* /, 1(2), 2022.
- Tribun-timur.com edisi Maret-April 2022